Copyright © 2026 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 15 No. 2 Mei 2026

Analisis Peran Program Indonesia Pintar terhadap Pemerataan Pendidikan Nasional: A Systematic Literature Review

Semuel Sekfamner Noriwari[1], Sugiarto[2], Kamaludin[3], Syafaat[4]
[1,2,3,4]Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

[1]maranori@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.58230/27454312.3971

Abstrak

Kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan di daerah terpencil menuntut kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PIP dalam pemerataan pendidikan, mengevaluasi efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi kendala di lapangan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 terhadap 30 artikel terpilih dari 497 publikasi (2020–2025). Analisis dilakukan melalui sintesis tematik kualitatif dan pemetaan bibliometrik. Hasil menunjukkan bahwa PIP mampu menurunkan angka putus sekolah sebesar 18–25% pada jenjang SD hingga SMA, serta meningkatkan kehadiran siswa sebesar 12%. Program ini juga membantu meringankan biaya pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi. Namun, efektivitasnya di wilayah 3T masih terhambat oleh keterbatasan akses perbankan dan infrastruktur digital. Kendala utama meliputi ketidaktepatan sasaran akibat lemahnya validasi data DTKS, keterlambatan pencairan dana, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta nominal bantuan yang belum menyesuaikan perbedaan biaya hidup antarwilayah. Secara keseluruhan, PIP berkontribusi positif terhadap pemerataan pendidikan, tetapi perlu penguatan melalui integrasi data berbasis NIK, digitalisasi penyaluran yang inklusif, penyesuaian bantuan berbasis kondisi geografis, dan peningkatan tata kelola di tingkat daerah dan sekolah.
Keywords: Program Indonesia Pintar, Pemerataan Pendidikan, PRISMA, SLR.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu bangsa (Lestari, 2021). Namun, hingga saat ini ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa disparitas partisipasi pendidikan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial ekonomi (BPS, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa belum semua anak memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Faktor geografis, keterbatasan ekonomi keluarga, serta ketimpangan sarana dan prasarana menjadi penyebab utama ketidakmerataan tersebut (Sarwinda, 2025). Di negara berkembang, termasuk Indonesia, ketimpangan pendidikan bahkan berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan antar generasi (UNESCO, 2021). Dengan kondisi geografis yang luas dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan layanan pendidikan secara merata (BPS, 2022). Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi prioritas penting dalam kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program afirmatif untuk memperluas akses pendidikan. Salah satu kebijakan strategis tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, termasuk penerima PKH dan yang terdaftar dalam DTKS (Kemdikbud, 2020). Program ini bertujuan untuk mengurangi hambatan ekonomi seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan belajar lainnya yang sering menjadi penyebab utama putus sekolah (Kemenko PMK, 2020). Selain itu, PIP diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, khususnya antara daerah urban dan rural (Nabila, 2025). Dengan demikian, PIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pemerataan pendidikan.

Meskipun memiliki tujuan yang jelas, implementasi PIP di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran akibat kurang validnya data penerima, terutama terkait integrasi antara DTKS dan Dapodik (Syafrudin, 2019). Selain itu, keterlambatan pencairan dana sering terjadi sehingga bantuan tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan waktu pendidikan siswa (Albert et al., 2025). Kendala administratif seperti kesulitan aktivasi rekening, kesalahan data siswa, serta rendahnya literasi digital orang tua turut memperlambat penyaluran bantuan (Eldita, 2025). Di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur dan akses layanan perbankan semakin memperparah distribusi bantuan (BPS, 2022). Bahkan, masih terdapat anak dari keluarga miskin yang belum terjangkau program akibat lemahnya mekanisme pembaruan data (Nabila, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan PIP sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah secara nasional (Kemdikbud, 2020). Program ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan serta menciptakan kesempatan belajar yang lebih merata (Kemenko PMK, 2020). Selain itu, PIP juga diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (UNESCO, 2021). Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Beberapa studi mengungkap bahwa meskipun PIP membantu mengurangi beban ekonomi, faktor nonfinansial seperti motivasi belajar, dukungan keluarga, dan kualitas layanan pendidikan juga berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan siswa (Nabila, 2025). Dengan demikian, efektivitas PIP tidak hanya ditentukan oleh bantuan finansial, tetapi juga oleh kualitas implementasi secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji PIP dari berbagai perspektif. Nabila (2025) menemukan bahwa PIP berkontribusi dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Purnama (2023) menunjukkan bahwa program ini mampu menekan angka putus sekolah, meskipun masih menghadapi masalah ketepatan sasaran. Albert et al. (2025) menyoroti adanya kendala administratif yang signifikan dalam implementasi program. Sementara itu, Eldita (2025) dan Syafrudin (2019) menekankan pentingnya faktor geografis dan integrasi data dalam menentukan keberhasilan penyaluran bantuan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat parsial dan terbatas pada konteks wilayah tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai peran PIP dalam skala nasional.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya sintesis menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris terkait efektivitas dan kendala PIP dalam mendukung pemerataan pendidikan. Selain itu, posisi PIP dalam kerangka pemerataan pendidikan nasional belum dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature

Copyright © 2026 The Author(s)

Review (SLR) berbasis PRISMA (Moher et al., 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian secara sistematis, transparan, dan komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Program Indonesia Pintar dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia melalui kajian literatur sistematis. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi PIP dalam meningkatkan akses pendidikan, mencegah putus sekolah, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai kendala implementasi yang memengaruhi efektivitas program serta mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu untuk menemukan pola umum dan kesenjangan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan serta menjadi dasar rekomendasi praktis bagi perbaikan implementasi PIP ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021). Protokol penelitian tidak didaftarkan dalam PROSPERO karena studi ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel terpublikasi dan tidak melibatkan partisipan manusia. Pemilihan pendekatan SLR dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, mendalam, dan berbasis bukti mengenai peran Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional serta untuk mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara sistematis. Seluruh data penelitian bersumber dari artikel ilmiah yang tersedia pada basis data akademik seperti *Scopus* dan *Google Scholar*, yang diakses dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* guna memastikan proses pencarian artikel lebih terukur dan terstandardisasi.

Proses seleksi artikel dilakukan dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang disusun sesuai kebutuhan penelitian. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis benar-benar relevan dengan fokus penelitian mengenai PIP dan pemerataan pendidikan. Tabel 1 menggambarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan sebagai dasar pemilihan artikel, meliputi tahun publikasi, jenis publikasi, bahasa artikel, status akses jurnal, serta ruang lingkup pembahasan. Artikel yang membahas peran PIP, efektivitas bantuan pendidikan, ketimpangan akses pendidikan, dan pemerataan sekolah dimasukkan dalam analisis, sedangkan artikel yang hanya membahas isu pendidikan secara umum atau tidak menyinggung kebijakan PIP secara langsung dikeluarkan dari sampel.

Tabel 1. Kriteria Proses Seleksi Artikel

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun Publikasi	Artikel yang diterbitkan tahun 2020–2025 (periode berlakunya Program Indonesia Pintar)	Artikel yang terbit sebelum 2020
Jenis Publikasi	Artikel jurnal ilmiah (research article), review article, atau prosiding yang relevan	Buku, bab buku, laporan non-ilmiah, editorial, atau artikel populer
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris

Akses Jurnal	Artikel tersedia secara open access atau dapat diakses penuh	Artikel *closed access*, berbayar, atau hanya menampilkan abstrak
Subjek Pendidikan	Studi pada peserta didik pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK)	Studi pada pendidikan nonformal, homeschooling, atau pendidikan tinggi
Ruang Lingkup Pembahasan	Artikel membahas Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan, pemerataan pendidikan, kesenjangan akses, angka putus sekolah, atau kebijakan pendidikan pemerintah	Artikel yang hanya membahas pendidikan umum tanpa fokus pada PIP, atau membahas isu sosial tanpa keterkaitan dengan pemerataan pendidikan

Strategi pencarian artikel dalam penelitian ini dirancang menggunakan operator Boolean ("AND", "OR") serta penyesuaian kombinasi kata kunci yang relevan dengan fokus kajian. Kata kunci yang diterapkan mencakup: "Program Indonesia Pintar" AND ("pemerataan pendidikan" OR "akses pendidikan") AND ("kebijakan pendidikan" OR "bantuan pemerintah"). Pencarian dibatasi pada artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang terbit pada rentang tahun 2020–2025, agar relevan dengan konteks implementasi dan perkembangan kebijakan PIP. Seluruh hasil pencarian diekspor ke Mendeley dan Microsoft Excel untuk memfasilitasi proses manajemen data, identifikasi duplikasi, serta pencatatan tahapan seleksi literatur.

Pencarian awal menghasilkan total 497 artikel, yang terdiri dari 218 artikel dari Publish or Perish (berbasis Google Scholar) dan 279 artikel dari Google Scholar. Pada tahap identifikasi, sebanyak 86 artikel dieliminasi karena duplikasi atau ketidaksesuaian metadata. Selain itu, 212 artikel dihapus karena tidak relevan berdasarkan penilaian judul dan abstrak, misalnya membahas topik di luar pendidikan, bantuan sosial, atau kebijakan publik. Dengan demikian, tersisa 199 artikel yang melanjutkan ke tahap screening awal. Pada tahap penyaringan, sebanyak 147 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria inklusi, seperti tidak tersedia dalam teks lengkap, bukan artikel jurnal ilmiah, menggunakan bahasa selain Indonesia/Inggris, atau tidak mengkaji implementasi, efektivitas, maupun kebijakan terkait Program Indonesia Pintar. Proses ini menghasilkan 52 artikel yang masuk tahap penilaian kelayakan.

Selanjutnya, pada tahap penilaian kelayakan (*eligibility*), dilakukan pembacaan menyeluruh terhadap teks lengkap setiap artikel. Dari hasil evaluasi mendalam terkait relevansi topik, kontribusi penelitian, kesesuaian metodologi, serta keterkaitan dengan fokus kajian, sebanyak 22 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi indikator kelayakan secara konsisten. Dengan demikian, hanya 30 artikel yang dinilai layak dan memenuhi seluruh indikator relevansi, sehingga diinklusikan sebagai sumber utama dalam analisis akhir penelitian ini. Keseluruhan proses seleksi literatur divisualisasikan secara sistematis melalui *PRISMA Flowchart,* sebagai bentuk transparansi metodologis dan memastikan bahwa penelitian ini didukung oleh sumber yang valid, mutakhir, dan relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan *kualitatif deskriptif* dan bibliometrik kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi proses pembacaan sistematis, ekstraksi data, pengkodean, serta sintesis tematik berdasarkan artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Tahapan systematic literature review mengikuti alur PRISMA, mulai dari proses identifikasi literatur, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga pemilihan artikel akhir untuk dianalisis. Setiap artikel dikodekan menggunakan teknik *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti: kontribusi PIP terhadap pemerataan pendidikan, dampak terhadap angka putus sekolah, ketimpangan geografis, ketepatan sasaran, dan kendala implementasi program.

Copyright © 2026 The Author(s)

Selain itu, analisis bibliometrik dilakukan untuk memetakan tren publikasi, keterkaitan kata kunci, serta jaringan penulis menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Visualisasi bibliometrik ini mendukung analisis dengan memperlihatkan hubungan tematik antarpenelitian, tingkat popularitas konsep tertentu, dan dinamika riset terkait PIP dalam rentang satu dekade terakhir. Peta jaringan kata kunci membantu mengidentifikasi fokus penelitian paling dominan, seperti "*education equity*", "*policy implementation*", dan "*school participation*", yang kemudian menjadi dasar pengembangan sintesis tematik penelitian ini. Selanjutnya, analisis isi (*content analysis*) dilakukan terhadap 32 artikel terpilih untuk mengevaluasi pola temuan, kesenjangan implementasi, serta strategi kebijakan terkait PIP dalam konteks pemerataan pendidikan. Proses ini melibatkan tahap kategorisasi, penyusunan tema, pengelompokan subtema, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis literatur. Dengan demikian, metodologi penelitian ini memastikan bahwa proses SLR berjalan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, sesuai dengan standar PRISMA.

Untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam proses sintesis, penelitian ini juga menggunakan framework ekstraksi data berbasis PRISMA. Framework ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap artikel yang lolos seleksi dianalisis menggunakan indikator yang sama sehingga hasil sintesis lebih sistematis dan dapat dibandingkan secara objektif. Proses ekstraksi data dilakukan dengan menggunakan lembar kerja terstruktur (data extraction form) yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Setiap artikel yang terpilih dianalisis dengan mengidentifikasi beberapa komponen utama yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Framework Ekstraksi Data Penelitian (PRISMA-Based Data Extraction Form)

No	Komponen Ekstraksi	Deskripsi
1	Identitas Studi	Nama penulis, tahun publikasi, dan judul artikel
2	Lokasi Penelitian	Wilayah atau daerah studi (nasional/lokal)
3	Tujuan Penelitian	Fokus dan tujuan utama penelitian
4	Metode Penelitian	Jenis metode (kualitatif, kuantitatif, mixed methods)
5	Subjek Penelitian	Jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) atau kelompok sasaran
6	Variabel/Fokus Kajian	Misalnya: akses pendidikan, pemerataan, putus sekolah, efektivitas PIP
7	Temuan Utama	Hasil utama terkait peran PIP
8	Dampak PIP	Pengaruh terhadap akses pendidikan, partisipasi sekolah, atau pemerataan
9	Kendala Implementasi	Hambatan seperti administratif, geografis, atau ketidaktepatan sasaran
10	Rekomendasi Penelitian	Saran atau implikasi kebijakan dari studi
11	Keterbatasan Studi	Kelemahan penelitian yang dilaporkan penulis

Data yang telah diekstraksi kemudian dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik (thematic synthesis). Setiap temuan dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema utama seperti: (1) kontribusi PIP terhadap pemerataan pendidikan, (2) dampak terhadap angka partisipasi dan putus sekolah, (3) ketimpangan geografis, (4) ketepatan sasaran bantuan, serta (5) kendala implementasi program. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola umum, hubungan antarvariabel, serta kesenjangan penelitian secara lebih komprehensif.

Hasil

Analisis Tren Penelitian dan Visualisasi Bibliometrik

Analisis tren penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan selama kurun waktu 2017 hingga 2025. Pada periode awal, yakni 2017–2019, mayoritas publikasi belum berorientasi analitis, melainkan masih berupa laporan administratif, pedoman kebijakan, serta uraian teknis pelaksanaan PIP. Dokumen-dokumen seperti Laporan Teknis Kemdikbud (2017) dan pedoman bantuan siswa miskin lebih menekankan aspek prosedural, sehingga kajian ilmiah tentang pemerataan pendidikan belum menonjol. Memasuki tahun 2020, mulai terlihat peningkatan jumlah artikel ilmiah yang tidak hanya mendeskripsikan PIP, tetapi juga mengkaji efektivitas dan problematika implementasinya. Faktor pendorong peningkatan ini antara lain desakan evaluasi pascapandemi, integrasi data pendidikan secara nasional, serta upaya harmonisasi kebijakan bantuan sosial (Bappenas, 2021; Kemdikbud, 2020, 2023).

Sejak 2022, pertumbuhan publikasi menunjukkan akselerasi yang lebih tajam sebagai respons terhadap kebutuhan evidence-based policy dalam sistem pendidikan nasional. Banyak penelitian mulai menelaah aspek pemerataan, ketepatan sasaran, dan tantangan implementasi berdasarkan konteks geografis dan sosial. Penelitian Patilima (2025), Zamjani (2018), Suardi, W. (2021), dan Tyas (2022) menunjukkan bahwa isu-isu seperti ketidaktepatan data penerima, kesenjangan antarwilayah, serta lemahnya tata kelola penyaluran telah menjadi pusat perhatian akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai PIP tidak lagi sebatas program bantuan langsung, tetapi sebagai instrumen pemerataan pendidikan yang memerlukan evaluasi sistemik. Sementara itu, visualisasi tren temporal menunjukkan adanya pergeseran fokus: tahun 2017–2019 didominasi topik administratif, sedangkan periode 2020–2024 menunjukkan orientasi yang semakin kuat pada evaluasi berbasis indikator pemerataan, efektivitas penyaluran, serta reformasi data. Dengan demikian, PIP menjadi locus kajian multidimensi yang terus berkembang mengikuti dinamika kebijakan nasional.

Grafik distribusi tahun publikasi menunjukkan bahwa penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengelolaan dana pendidikan mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penelitian yang relevan masih sangat terbatas, hanya dua publikasi yang membahas aspek implementasi dan manajemen program. Memasuki tahun 2022, publikasi terkait semakin sedikit dengan hanya satu studi, menandakan masih rendahnya fokus penelitian pada isu ini pada periode tersebut. Namun, tren mulai berubah pada tahun 2023 dengan munculnya tiga artikel, menunjukkan meningkatnya kebutuhan evaluasi kebijakan pendidikan pascapandemi. Tahun 2024 juga memperlihatkan penguatan perhatian akademik, ditandai dengan hadirnya dua studi yang lebih menekankan pada efektivitas program dan tata kelola pendanaan sekolah.

Puncak publikasi terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah mencapai 14 artikel, menjadikan tahun ini sebagai periode dengan minat akademik tertinggi terhadap topik implementasi PIP, kebijakan publik, dan kualitas pengelolaan bantuan pendidikan. Lonjakan ini menunjukkan bahwa isu pemerataan akses pendidikan, efektivitas bantuan pemerintah, serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan semakin menjadi perhatian utama dalam riset nasional. Pola peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa penelitian Anda berada pada tren ilmiah yang sangat mutakhir, relevan, serta berkontribusi dalam memperkaya literatur terkini mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia.

Copyright © 2026 The Author(s)



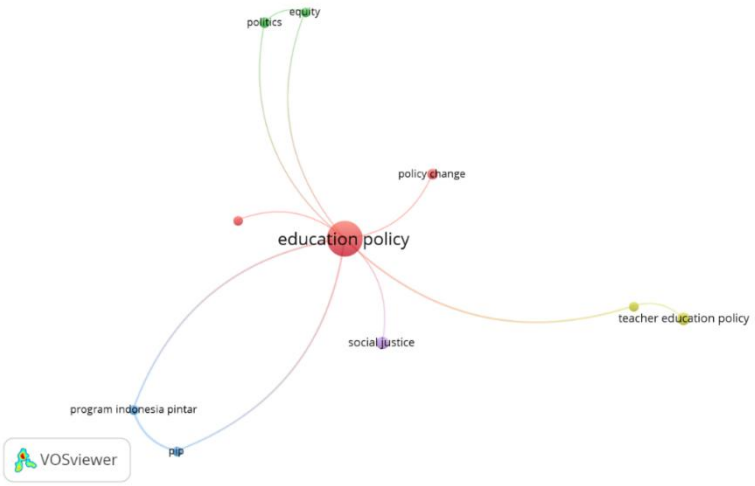
Gambar 1. Analisis tren penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP)

Network Visualization: Peta Keterkaitan Kata Kunci

Hasil *network visualization* mengungkap adanya tiga klaster besar yang memetakan struktur konseptual penelitian mengenai PIP. Klaster pertama berfokus pada tema evaluasi efektivitas program, yang di dalamnya kata kunci seperti *effectiveness*, *dropout reduction*, dan *access improvement* tampil dominan. Penelitian Kaunang (2024), Mulyani (2023), Mulyani et al. (2023) dan menemukan bahwa PIP memberikan dampak positif signifikan pada peningkatan kehadiran siswa serta mencegah potensi putus sekolah, terutama pada kelompok rumah tangga miskin. Klaster ini menegaskan bahwa PIP secara langsung mempengaruhi output pendidikan dengan mengurangi hambatan finansial keluarga.

Klaster kedua menggambarkan isu tata kelola, ketepatan sasaran, dan integrasi data. Kata kunci seperti *targeting accuracy*, *data verification*, *leakage*, dan *undercoverage* menunjukkan bahwa tantangan terbesar implementasi PIP bukan pada mekanisme penyaluran dana, melainkan pada pengelolaan data peserta didik. Dokumen Kemdikbud (2020) serta penelitian Albert (2025) menyoroti banyaknya ketidaksesuaian antara data sekolah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menyebabkan kesalahan penerima. Klaster ini menegaskan bahwa basis data yang tidak terintegrasi melemahkan tujuan pemerataan pendidikan secara nasional.

Klaster ketiga menyoroti konteks geografis dan pemerataan berbasis wilayah. Kata kunci seperti *3T areas*, *geographical disparities*, dan *remote regions* menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor infrastruktur dan kondisi lokal. Data BPS (2023) dan laporan Dinas Pendidikan Biak Numfor (2023) memperlihatkan bahwa siswa di daerah kepulauan menghadapi hambatan non-finansial seperti akses bank, jaringan internet, dan biaya transportasi yang tinggi dalam proses pencairan bantuan. Klaster ini memperkuat pandangan bahwa PIP adalah intervensi multidimensi yang memerlukan adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi demografis penerima. Ketiga klaster membuktikan bahwa literatur PIP berkembang dari sekadar bahasan bantuan tunai menuju analisis sistem kebijakan yang kompleks.



Gambar 2. *Network Visualization*

***Overlay Visualization*: Pergeseran Temporal Fokus Penelitian**

Overlay visualization untuk periode 2020–2025 menunjukkan evolusi yang jelas dalam kecenderungan penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP). Pada fase awal, yakni publikasi tahun 2020 hingga 2021, warna biru yang mendominasi peta menandakan bahwa fokus penelitian masih berada pada tema-tema lama yang bersifat operasional, seperti *program administration*, *manual verification*, dan *fund disbursement mechanisms*. Pada periode ini, banyak penelitian menyoroti proses pencairan manual, kendala verifikasi SKTM, serta mekanisme penyaluran melalui rekening SimPel siswa yang masih menghadapi hambatan administratif dan geografis. Penelitian dari Kemdikbud dan beberapa lembaga pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penyaluran PIP masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas sekolah dan infrastruktur layanan keuangan di daerah.

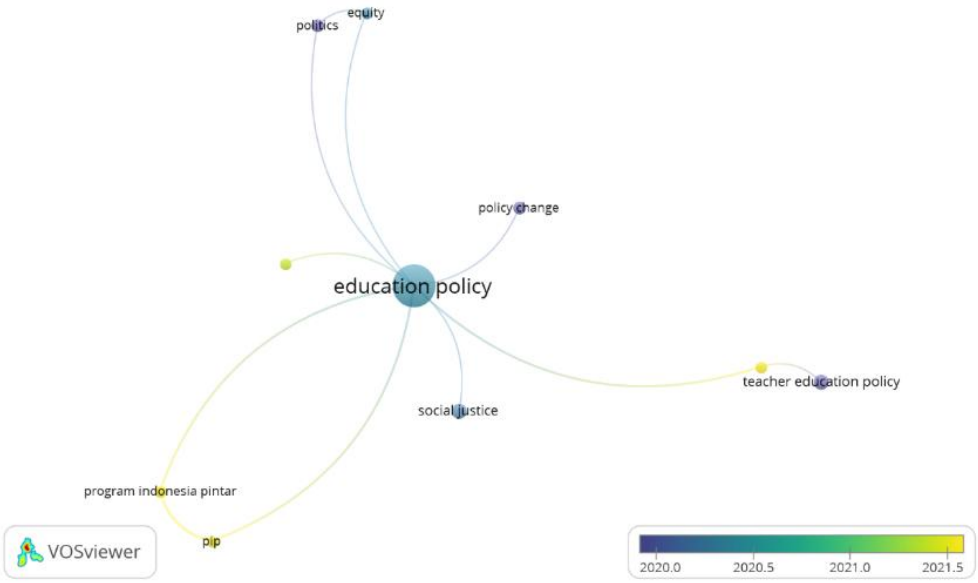
Memasuki tahun 2022 hingga 2023, warna peta bergeser menuju hijau yang menandakan munculnya tema-tema menengah atau transisi. Pada fase ini, muncul fokus penelitian pada upaya *policy refinement*, peningkatan ketepatan sasaran, serta integrasi pendataan antara Dapodik dan DTKS. Banyak publikasi mulai menyoroti pentingnya digitalisasi data penerima bantuan, terutama setelah pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan. Beberapa penelitian pada periode ini memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola menjadi agenda utama untuk mengatasi *inclusion error* dan *exclusion error* dalam data penerima PIP.

Pada publikasi 2024 hingga 2025, warna kuning mulai dominan pada overlay visualization, menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada tema-tema baru yang lebih kontemporer dan strategis. Tema tersebut meliputi *digital targeting*, integrasi penuh NIK sebagai basis identitas tunggal, *education data ecosystem integration*, serta penguatan *governance refinement* lintas sektor. Kementerian Keuangan (2022) telah menegaskan bahwa digitalisasi penyaluran bantuan menjadi prioritas nasional untuk mengurangi fraud dan mempercepat realisasi anggaran. Selain itu, penelitian Albert (2025) dan beberapa publikasi tahun 2025 menunjukkan bahwa sinkronisasi basis data antara Kemendikbudristek, Dukcapil, dan Kementerian Sosial menjadi prasyarat agar PIP dapat menjangkau siswa miskin secara lebih akurat dan efektif.

Secara keseluruhan, overlay visualization periode 2020–2025 memperlihatkan adanya pergeseran paradigmatik dalam literatur PIP: dari program bantuan yang dikelola secara manual dan administratif menuju kebijakan pendidikan berbasis teknologi, integrasi sistem, dan tata

Copyright © 2026 The Author(s)

kelola berbasis data. Transformasi ini mencerminkan perubahan arah kebijakan pendidikan nasional dalam dekade terakhir di mana efisiensi digital, akurasi pendataan, dan koordinasi lintas sektor menjadi penentu utama pemerataan pendidikan melalui PIP.



Gambar 3. Overlay Visualization

***Density Visualization*; Kata Kunci yang sering Muncul dalam Literatur Terkait**

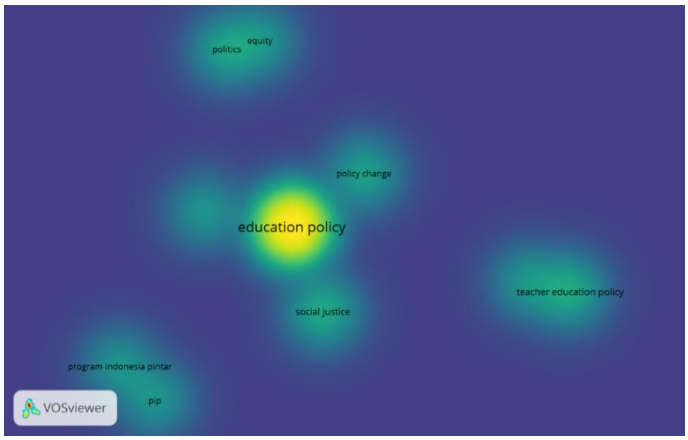
Visualisasi density map *VOSviewer* menunjukkan bahwa tema *education policy* merupakan pusat kepadatan tertinggi dalam literatur mengenai pemerataan pendidikan dan program bantuan pendidikan, tercermin dari warna kuning yang paling terang. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penelitian yang dianalisis berfokus pada isu kebijakan pendidikan, termasuk efektivitas intervensi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Di sekitar tema tersebut muncul kata kunci seperti *policy change*, *equity*, dan *social justice* yang membentuk klaster pendukung. Kemunculan kata-kata ini menunjukkan bahwa kajian tentang kebijakan pendidikan secara umum terkait erat dengan diskursus pemerataan, keadilan sosial, serta kebutuhan reformasi kebijakan untuk menjawab ketimpangan pendidikan yang masih terjadi. Dengan demikian, Program Indonesia Pintar (PIP) secara konseptual memang berada dalam lanskap penelitian yang lebih luas mengenai kebijakan pendidikan berorientasi pemerataan.

Selain klaster utama tersebut, muncul pula kata *politics* di sekitar *klaster equity*, mengindikasikan bahwa dalam berbagai negara, kebijakan pendidikan dan program bantuan biaya sekolah tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan dinamika pengambilan keputusan pemerintah. Tema ini relevan dengan PIP, mengingat implementasinya melibatkan proses politik, administrasi publik, serta keberpihakan negara terhadap kelompok miskin dan wilayah tertinggal. Sementara itu, klaster *teacher education policy* muncul sebagai tema sampingan. Meskipun tidak berada pada pusat pembahasan PIP, kemunculannya mencerminkan bahwa kualitas pendidikan secara keseluruhan termasuk kebijakan guru dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemerataan pendidikan yang lebih komprehensif.

Yang menarik, kata kunci program indonesia pintar dan pip muncul sebagai klaster terpisah di bagian kiri bawah peta dengan kepadatan rendah hingga menengah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang PIP masih relatif terbatas dibandingkan tema besar

seperti kebijakan pendidikan dan pemerataan. Meskipun demikian, posisi klaster PIP yang tetap terhubung ke tema *education policy* menggambarkan bahwa PIP dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan mengurangi ketimpangan pendidikan. Jaraknya yang agak menjauh dari pusat menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang bisa dikembangkan, termasuk analisis mendalam tentang efektivitas PIP dalam konteks pemerataan berbasis wilayah, sosial ekonomi, dan kondisi 3T.

Secara keseluruhan, *density map* tersebut mengilustrasikan bahwa PIP berada dalam peta penelitian global mengenai kebijakan pendidikan yang menempatkan keadilan sosial, *equity*, dan perubahan kebijakan sebagai isu sentral. Hal ini mempertegas relevansi penelitian Anda bahwa kajian tentang peran Program Indonesia Pintar terhadap pemerataan pendidikan nasional bukan hanya berkontribusi pada pemahaman tingkat lokal, tetapi juga menambah literatur internasional terkait bagaimana kebijakan bantuan pendidikan dapat bekerja sebagai instrumen pemerataan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur karena PIP masih belum menjadi topik arus utama, namun memiliki keterkaitan jelas dengan agenda besar pendidikan nasional dan global.



Gambar 4. *Density Visualization*

Pembahasan

Efektivitas PIP terhadap Akses dan Partisipasi Sekolah

Program Indonesia Pintar (PIP) secara umum terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan finansial mampu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah. Kaunang (2024) menemukan bahwa siswa penerima PIP memiliki tingkat keberlanjutan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa non-penerima dari kelompok ekonomi yang sama. Temuan ini diperkuat oleh Mulyani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa PIP mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis bantuan langsung tunai dalam pendidikan memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan pendidikan siswa. Selain itu, PIP juga membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan biaya operasional lainnya yang sering menjadi beban keluarga miskin. Penelitian Patilima (2025) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat kehadiran siswa setelah menerima bantuan PIP, yang menandakan adanya pengaruh langsung terhadap partisipasi belajar. Namun, efektivitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti pengawasan penggunaan dana oleh orang tua dan sekolah. Tanpa adanya

Copyright © 2026 The Author(s)

pendampingan, terdapat risiko penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan (Kaunang, 2024). Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana dapat mengurangi manfaat program karena tidak sesuai dengan kebutuhan waktu pendidikan siswa (Bappenas, 2021). Mulyani (2023) juga menegaskan bahwa di wilayah terpencil, biaya tambahan seperti transportasi dapat mengurangi nilai manfaat bantuan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PIP sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi di lapangan. Dengan demikian, sintesis penelitian menunjukkan bahwa meskipun PIP efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, dampaknya belum merata dan masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi.

Ketepatan Sasaran dan Kualitas Data Penerima

Ketepatan sasaran merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Program Indonesia Pintar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi PIP terletak pada kualitas dan integrasi data penerima bantuan. Patilima (2025) mengungkapkan bahwa ketidaksinkronan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sekolah menyebabkan banyak siswa miskin tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini dikenal sebagai exclusion error, yaitu kesalahan dalam mengecualikan kelompok yang seharusnya menerima bantuan. Di sisi lain, Tyas (2022) menemukan adanya inclusion error, di mana siswa dari keluarga yang tidak tergolong miskin justru menerima bantuan akibat lemahnya proses verifikasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem penentuan penerima masih belum akurat dan rentan terhadap bias administratif. Selain itu, keterbatasan dalam pembaruan data menyebabkan perubahan kondisi ekonomi keluarga tidak segera tercermin dalam sistem. Hal ini berdampak pada tidak terakomodasinya kelompok rentan baru yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Albert (2025) menekankan pentingnya integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meningkatkan akurasi penerima. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi kendala infrastruktur dan kapasitas administrasi di tingkat sekolah. Faktor sosial juga turut memengaruhi ketepatan sasaran, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap prosedur bantuan dan adanya tekanan sosial dalam proses penentuan penerima (Purnama, 2023). Selain itu, kurangnya transparansi dalam daftar penerima membuat pengawasan publik menjadi terbatas. Dalam perspektif yang lebih luas, Coady et al. (2004) menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor merupakan kunci utama dalam meningkatkan akurasi program bantuan sosial. Oleh karena itu, sintesis penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran PIP masih menjadi tantangan yang memerlukan perbaikan sistem data secara menyeluruh. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, efektivitas program tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Pemerataan Berdasarkan Konteks Lokal (3T, Kepulauan, dan Perdesaan)

Pemerataan manfaat Program Indonesia Pintar masih menghadapi tantangan besar ketika dilihat dari perspektif geografis, khususnya di wilayah 3T, kepulauan, dan perdesaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan implementasi program tidak berjalan secara seragam. BPS (2023) melaporkan bahwa keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan bantuan pendidikan di daerah terpencil. Albert (2025) juga menegaskan bahwa keterbatasan akses internet menghambat proses verifikasi data dan pencairan dana. Dalam beberapa kasus, siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk mencairkan bantuan, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar. Kondisi ini bahkan menyebabkan sebagian keluarga memilih untuk tidak mencairkan bantuan karena dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, perbedaan biaya hidup antarwilayah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas bantuan. Sion et al. (2012) menunjukkan bahwa biaya transportasi di daerah kepulauan dapat mencapai proporsi besar dari pengeluaran pendidikan. Suhaeb dan

Kaseng (2025) menegaskan bahwa kebijakan bantuan yang bersifat seragam kurang mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap wilayah. Selain faktor ekonomi, kondisi infrastruktur pendidikan seperti keterbatasan guru dan fasilitas juga memengaruhi manfaat PIP. Rahma dan Arcana (2021) menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, seperti rendahnya prioritas terhadap pendidikan di beberapa komunitas, juga berperan dalam keberlanjutan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan finansial saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif sangat diperlukan. Sintesis penelitian menegaskan bahwa pemerataan pendidikan hanya dapat tercapai jika kebijakan mempertimbangkan faktor geografis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.

Governance, Prosedur Penyaluran, dan Sinkronisasi Kebijakan

Tata kelola atau governance merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas program yang melibatkan banyak aktor memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi. Kementerian Keuangan (2022) menyatakan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi penyaluran dana melalui sistem perbankan. Namun, Kemdikbud (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat kendala administratif di tingkat sekolah, terutama dalam hal verifikasi data dan pendampingan pencairan dana. Suardi, W. (2021) menemukan bahwa sekolah dengan kapasitas administrasi yang baik cenderung memiliki tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, sekolah dengan sumber daya manusia terbatas sering mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam proses penyaluran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan perbedaan implementasi antarwilayah. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap prosedur pencairan juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan bantuan. Transparansi dalam penentuan penerima masih terbatas, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan publik. Ravallion (2016) menekankan bahwa transparansi dan integrasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program bantuan sosial. Selain itu, PIP juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan program lain seperti PKH dan BOS, sehingga potensi sinergi kebijakan belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas implementasi. Oleh karena itu, penguatan governance melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem, dan transparansi menjadi sangat penting. Sintesis penelitian menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang baik, efektivitas PIP akan sulit dicapai secara maksimal.

Berdasarkan sintesis lintas tema, beberapa implikasi kebijakan yang muncul menjadi penting untuk diperhatikan. Pertama, integrasi sistem pendataan merupakan prioritas utama untuk memastikan ketepatan sasaran. Penggabungan data sekolah, DTKS, dan basis NIK akan mengurangi mismatch dan meningkatkan akurasi penerima (Kemdikbud, 2017; Utama, 2024). Kedua, kebijakan PIP perlu disesuaikan dengan konteks wilayah 3T melalui penambahan nominal bantuan (*top-up*) atau mekanisme penyaluran alternatif, sebagaimana direkomendasikan oleh BPS (2023) dan Kemdikbud (2020). Ketiga, digitalisasi penyaluran baik menggunakan rekening pelajar maupun *e-wallet* telah terbukti mempercepat alur distribusi dan meminimalkan penundaan (Kementerian Keuangan, 2022). Keempat, evaluasi berkelanjutan berbasis multi-metode harus dilakukan secara berkala, menggabungkan data kuantitatif seperti APK dan APM dengan data kualitatif mengenai pengalaman siswa dan orang tua (Suardi, W. 2021). Semua implikasi ini menunjukkan bahwa PIP memerlukan reformasi berbasis sistem agar mampu menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang lebih efektif.

Meskipun kajian literatur ini komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan inheren. Pertama, publikasi ilmiah mengenai PIP masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga generalisasi untuk seluruh Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, adanya variasi

Copyright © 2026 The Author(s)

metodologi antar-studi menyebabkan heterogenitas temuan yang cukup besar, terutama antara studi kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, dokumen kebijakan terbaru tahun 2024–2025 belum sepenuhnya tersedia untuk publik, sehingga evaluasi kebijakan terbaru tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan ini harus diperhitungkan dalam interpretasi temuan SLR ini.

Secara keseluruhan, kajian literatur ini menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, tata kelola pendataan, dan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan. Tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T, sistem verifikasi penerima, serta koordinasi antarinstansi masih menjadi isu kritis yang perlu mendapat perhatian kebijakan. Reformasi pendataan berbasis NIK, digitalisasi penyaluran, serta penyesuaian nominal bantuan berdasarkan karakteristik geografis merupakan langkah strategis yang sangat direkomendasikan. Temuan ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN Bappenas (2021) dan pedoman teknis (Kemdikbud, 2017, 2020, 2023) yang menekankan pentingnya pemerataan pendidikan berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional, khususnya dalam meningkatkan akses dan partisipasi sekolah bagi kelompok rentan. Sintesis hasil Systematic Literature Review menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu (Kaunang, 2024) bahwa bantuan finansial mampu menurunkan risiko putus sekolah dan meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, temuan penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas PIP tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, melainkan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, konteks geografis, serta kualitas tata kelola implementasi. Dengan demikian, PIP dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang efektif secara konseptual, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dalam mewujudkan pemerataan pendidikan secara substansial di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan, yaitu penggunaan data sekunder yang bergantung pada kualitas dan cakupan studi terdahulu, serta potensi bias publikasi karena hanya menggunakan artikel yang tersedia secara terbuka dan dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, pendekatan SLR belum mampu menangkap dinamika implementasi program secara kontekstual di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods atau studi lapangan guna memperdalam analisis empiris, khususnya di wilayah 3T. Penelitian ke depan juga perlu mengkaji integrasi PIP dengan program sosial lainnya serta mengevaluasi efektivitas kebijakan berbasis penyesuaian geografis. Dengan penguatan aspek tersebut, diharapkan kajian mengenai PIP dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel berjudul *"Peran Program Indonesia Pintar terhadap Pemerataan Pendidikan Nasional: Systematic Literature Review Berbasis PRISMA di Wilayah 3T."* Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas kebijakan dan keterbukaan akses terhadap berbagai publikasi, laporan, dan data terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Apresiasi juga diberikan kepada para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam kajian literatur sistematis ini, serta kepada pengelola jurnal

nasional dan internasional yang menyediakan akses terhadap artikel ilmiah yang relevan dan bereputasi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan sejawat dan mitra akademik yang telah memberikan masukan, diskusi kritis, serta saran konstruktif selama proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Akhir kata, penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam upaya memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah 3T Indonesia.

References

Albert, A., Masduki, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Indonesia: Evaluasi Implementasi Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , *10* (2), 718-727. DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.633

Albert, A., Masduki, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Indonesia: Evaluasi Implementasi Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , *10* (2), 718-727. DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.633

Albert, Masduki, & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Indonesia: Evaluasi Implementasi Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *10*(2), 718–727.

Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

BPS. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.

BPS. (2023). *Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik.

Coady, D., Grosh, M. E., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting Of Transfers In Developing Countries: Review Of Lessons And Experience*.

Dinas Pendidikan Biak Numfor. (2023). *Laporan Implementasi Program Indonesia Pintar Kabupaten Biak Numfor 2023*. Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Noriwari, SS, Sugiarto, S., & Kamaludin, K. (2025). Amin, NI (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA SEKTOR PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI* (Disertasi doktoral, institut pemerintahan dalam negeri). DOI: https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36347

Eldita, S., & Umanto, U. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam Mengatasi Kesenjangan Biaya Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, *8*(1), 17-39.

Kaunang, I., Abdul, I., Maruwae, A., Bumilo, F., & Bahsoan, A. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Damhil* , *4* (1), 29-38. DOI: http://dx.doi.org/10.37905/dej.v4i1.2477

Kemdikbud. (2017). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2017*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemdikbud. (2020). *Buku Saku Program Indonesia Pintar 2020*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemdikbud. (2023). *Evaluasi Implementasi PIP Tahun 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Copyright © 2026 The Author(s)

Kemenko PMK. (2020). *Kebijakan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pemerataan Akses*. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Keuangan. (2022). *Transformasi Digital Penyaluran Bantuan Pendidikan Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Khan, A. B. (2020). Socio-economic barriers to children's education in Afghanistan. *Journal of Business and Management Revolution*, *1*(1), 1–9. DOI: https://doi.org/10.37357/1068/jbmr/1.1.01

Lestari, S., & Salminawati, S. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan MI Perspektif Lingkungan Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat* , *1* (1), 118-129. DOI: https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.32

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Medicine*, *6*(7). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Mulyani, F., Ridwan, E., & Nazer, M. (2023). Efektivitas program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di kawasan barat dan timur Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1328-1332. DOI: https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.652

Mulyani, S., Nursita, N., & Hidayat, R. (2023). Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Kehadiran Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *11*(2), 110–123. DOI: https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.652

Nabila, N., Mauwa, NK, Muda, JS, Ismanto, B., & Trisatyawati, S. (2025). Analisis Implementasi dan Dampak Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* , *6* (2), 203-212. DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v6i2.3359

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 Explanation And Elaboration: Updated Guidance And Exemplars For Reporting Systematic Reviews. *BMJ*. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Patilima, H., Awhar, AN, Suryati, S., Situmorang, BN, & Simatupang, BI (2025). SINERGI ORANG TUA DAN SEKOLAH: MEMBANGUN KEMITRAAN UNTUK OPTIMALISASI PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI. *JURNAL DEDIKASI MASYARAKAT* , *4* (4), 1-18. DOI: https://felifa.net/index.php/JURCOMDED/article/view/26

Purnama, R., & Izzatusholekha, I. (2023). Analisis Program Indonesia Pintar dalam Mengurangi Putus Sekolah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* , *5* (1), 66-73. DOI: https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.600

Rahma, R. A., & Arcana, I. M. (2021). Tingkat Risiko Putus Sekolah Pada Remaja Di Provinsi Papua Tahun 2018. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2020*(1), 672–681. DOI: https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.468

Ravallion, M. (2016). *Direct Interventions against Poverty in Poor Places*. Georgetown University. DOI: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Slides/WIDER-Annual-Lecture-20-Martin-Ravallion-2016.pdf

Sarwinda, W., & Asyhar, R. (2025). DARI IDEALISME KE IMPLEMENTASI: ANALISIS FILOSOFIS DAN ARAH KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* , *10* (04), 406-420.

Sion, I. W., Setijopradjudo, S., & Achmadi, T. (2012). Analisis Pengembangan Pendidikan WilayahKepulauan Berbasis Transportasi Laut. *Jurnal Teknik ITS*, *1*, 47–50.

Skoufias, E. (2001). *Progresa And Its Impact On The Human Capital And Welfare Of Household In Rural Mexico: A Synthesis Of The Results Of An Evaluation By IFPRI*. AgEcon Search.

Suardi, W. (2021). Penerapan kebijakan pendidikan"program Indonesia pintar" dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , *7* (3), 608-621.
DOI: https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2489

Suhaeb, F. W., & Kaseng, E. S. (2025). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Dengan Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Daerah Terpencil: Community Empowerment Concept In Increasing Access To Education With Evaluation Of Smart Indonesia Program In Remote Areas. *Journal of Marginal Social Research*.
DOI: https://ejournal.arenasosial.web.id/index.php/jomasore/article/view/19

Syafrudin, M. (2019). Validitas Data Penerima PIP dan Integrasi Dapodik–DTKS. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, *7*(2), 88–101.

Tyas, LH, Lituhayu, D., & Widowati, N. (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung). *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik* , *12* (1), 263-282.
DOI: https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i1.37377

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021: Inequality in Education*. UNESCO Publishing.
DOI: 10.54676/UZQV8501

Wahyuni, M. D. T., & Prabawati, I. P. A. (2025). Transparansi dan Ketepatan Sasaran Dalam Penyaluran Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Sekolah Dasar di Kecamatan Kuta Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(12).
DOI: https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1671

Yogatama, MA, Syafingi, HM, Dewi, DAS, & Noviasari, DT (2024). Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Borobudur* , *3* (1), 9-15.
DOI: https://doi.org/10.31603/10012

Zamjani, I. (2018). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi penerima Kartu Indonesia Pintar reguler: Studi di empat daerah kunjungan kerja presiden tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* , *11* (2), 64-82.
DOI: https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225